DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. dan Bayu, T.C. (2011). Analisa Aspek Rasional dalam Penganggaran Publik terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal MAKSIMUM*, 1 (1). hal. 68-77.
- Adiwirya, M. F., dan Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2). hal 611-628.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabiltas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12 (2). hal 110-125.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____ (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23
 Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____ (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. dan Anderson, R.E. (2010). *Multivariate Data Analysis:* 7th Edition. New York: Pearson
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia cetakan 9*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hotdianty, H. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Sumber Daya Manusia, Reward dan Punishment terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon*, 3(1). hal 31-45.

- Pengertian *Sistem Pengendalian Intern Menurut PP No 60 tahun 2008*. http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp. (diakses 15 November 2018).
- Pemerintah Kabupaten Sleman Tentang *Prestasi Kabupaten Sleman Tahun 2018*. http://www.slemankab.go.id/category/prestasi. (diakses 17 November 2018).
- Pengertian Tentang Anggaran Berbasis Kinerja. http://www.djpk.depkeu.go.id (diakses 18 November 2018).
- Peraturan Pemerintah Tentang Ruang Lingkup Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja. http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=628. (diakses 05 Desember 2018).
- Permasalahan Implmentasi Anggaran Berbasis Kinerja. http://solo.tribunnews.com/2016/07/18/empat-permasalahan-implementasi-anggaran-berbasis kinerja. (diakses 07 Desember 2018).
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Better Pratice Guide Penganggaran Berbasis Kinerja.
- Lubis, A.I. (2017). *Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- _____. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- ______.(2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mokoginta, N., Lambey, L., dan Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2). hal 874-890.
- Nordiawan, D. dan Ayuningtyas H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurillah. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- ______.No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga.
- ______. Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., dan Sofyani, H. (2017). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Anggaran di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(1). hal 9-24.
- Purwanto, N. (2009). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratmono, D. dan Rita, S. (2016). Anteseden dan Konsekuensi Keberhasilan Implmentasi Perfomance-Based Budgeting pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20 (1). hal 13-26.
- Rosalin, F. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada BLU di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Samara, G.O. (2016). Analisis Penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabiltas Kinerja pada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, R.N. (2015). Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Sarwoto. (2010). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sembiring, BB. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. Universitas Sumatra Utara
- Sholihah, R.A., Rosidi., dan Purnomosidhi, B. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Tujuan terhadap Implementasi Anggaran

- Berbasis Kinerja dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi, 3(1). *Jurnal El-Dinar*. hal 41-81.
- Sriharioto dan Ratna, W. (2012). Good Goverance, Kompetensi KPPN dan Persepsi Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja Kementrian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi*. hal 1-41.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sumampow, M., Tinagon, J., dan Tangkuman, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (1). hal 194-201.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____.No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Warsita, B. (2008). Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya. Jakarta: Rineka.
- Widarjono, A. (2015). Statistika Terapan Dengan Excel & SPSS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuwono, S., Tengku A.I., dan Hariyandi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.